

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sesuai hasil analisis dan pembahasan di atas maka penelitian ini berkesimpulan bahwa:

1. Ketimpangan antar kabupaten/kota terlihat berfluktuasi dalam lima tahun pengamatan.
2. Ruang fiskal dalam APBD Kabupaten/Kota juga terjadi fluktuasi. Peningkatan ruang fiskal dalam APBD Kabupaten/Kota mampu menurunkan angka ketimpangan yang terjadi. Dengan kata lain semakin besar ruang fiskal dalam APBD yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota maka akan semakin mudah bagi pemerintah untuk melaksanakan berbagai program-program pembangunan di daerah yang tujuannya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat.
3. Ruang fiskal memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan antar kabupaten/kota, hal ini disebabkan ruang fiskal yang ada di APBD dialokasikan untuk belanja langsung seperti belanja modal dan belanja barang dan jasa sangat besar peranannya dalam APBD kabupaten/kota.

5.2. Saran

Adapun beberapa rekomendasi saran terkait hasil analisis di atas, penulis merekomendasikan saran beberapa hal yakni :

1. Terkait ketimpangan yang masih terjadi, pemerintah diharapkan lebih fokus untuk peningkatan kualitas pelayanan dasar publik seperti

pendidikan, kesehatan, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran yang ada untuk dibelanjakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang masih berada di 40% terbawah.

2. Perluasan program bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan untuk menjangkau keluarga termiskin di pedesaan, dan perluasan program bantuan pangan non tunai untuk mendukung penyediaan bantuan pangan padat nutrisi kepada masyarakat dan melakukan pembaruan dua arah untuk memperbaiki sasaran untuk memfasilitasi integrasi di semua program utama bantuan sosial. Terutama dari basis data penargetan menjadi daftar penerima manfaat berbasis program, dan dari informasi berbasis program menjadi basis data sasaran pemberian bantuan sosial hal ini diharapkan mampu menekan angka ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi di pedesaan dan perkotaan.
3. Perencanaan program harus dipastikan untuk dapat ditingkatkan sehingga memberikan manfaat pada saat dibutuhkan. Upaya pemantauan dan evaluasi yang lebih baik juga dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam perancangan program.
4. Dari sisi perencanaan APBD terkait dengan ruang fiskal, pemerintah daerah kabupaten/kota harus berupaya untuk meningkatkan akurasi perencanaan penerimaan APBD dan koordinasi transfer dari APBD provinsi.
5. Dari sisi pelaksanaan APBD dapat dilakukan dengan mendorong penyerapan anggaran sesuai rencana melalui peningkatan monitoring

dan evaluasi. Apabila terdapat perubahan peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah, hendaknya diberikan masa transisi untuk mengimplementasikan peraturan baru tersebut (diberlakukan pada tahun berikutnya) karena penyesuaian terhadap peraturan baru berpotensi menghambat pelaksanaan / penyerapan anggaran.

6. Memperhatikan anggaran pemerintah daerah yang sering mengendap (idle) di perbankan maka untuk memperkecil simpanan Pemda di perbankan terutama pada pertengahan tahun akibat *missmatch* waktu penerimaan kas daerah dan kebutuhan belanja daerah dapat dilakukan dengan cara menyalurkan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) berdasarkan kebutuhan daerah. Anggaran tersebut untuk segera dicairkan ke daerah-daerah sehingga masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- (Calderón & Servén, 2004; Démurger, 2001; Maryaningsih, Hermansyah, & Savitri, 2014).
- Adams,R. H. Jr. 2003. Economic Growth, Inequality,and poverty : Finding from a new Data set. Policy Research Working Paper #2972. World Bank.
- Amri, K. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan: Data Panel 8 Provinsi di Sumatera. *Jurnal Emt Kita*, 1(1), 1-11.
- Amri, Khairul. 2017. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan : Panel Data 8 Provinsi di Sumatera. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, vol.1 no.1 hal. 1-11
- Arham, M. A. (2014). Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektoral, dan Ketimpangan Antarkabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 14(2), 145-167.
- Badan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo. 2009. Sewindu Kinerja Hasil Pembangunan Gorontalo Tahun 2001-2008. Gorontalo
- Badan Pusat Statitik. 2020*
- Djojohadikusumo,S. 1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi : Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pemvangan. Jakarta : LP3ES
- Dumairy. (1999). perkonomian Indonesia, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Erlangga.
- Heller. S Peter.(2005). Understanding Fiscal Space. IMF Policy Discussion Paper.
- Hronova, S., Hindls, R. 2013. Czech Households In The Years Of Crises. *Statistics and Economic Journal*, vol. 93 no.4 hal. 4-26.
- Irwan dan M Suparmoko. (1987)ekonomi pembangunan, Yogyakarta : Liberty
- Istiqamah, Syaparuddin, Selamat Rahmadi. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan (Studi

- Provinsi-Provinsi Indonesia). e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 7. No. 3 Hal.111-126
- Iswanto, Denny. (2015). Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur. Signifikan vol. 4 no. 1 hal. 42-43
- Kuncoro, M. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Erlangga.
- Kuznets, Simon. 1955. Economic Growth and Income Inequality. The American Economic Review, 45(1)
- Mopangga, H. (2014). Analisis ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Trikonomika Journal*, 10(1), 40-51.
- Mopangga, H. (2014). Analisis ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Trikonomika Journal*, 10(1), 40-51.
- Murty, 2000. Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Berkelanjutan: P4W Press, Bogor.
- Puspitawati, L. T. (2013). Analisis perbandingan faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di kawasan kedungsapur. *Economics Development Analysis Journal*, 2(2).
- Raswita, N. P. M. E., & Utama, M. S. (2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(3).
- Riandi, Munzi, Cut Risya Varlitya. 2020. Pengaruh Kemiskinan Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Sumatera Indonesia. *Jurnal Ekombis Home* Vol. 6 no 1. hal.57-68.
- Sasana, H. (2009). Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 16(01).

- Sjafrizal. 2008. ketimpangan distribusi pendapatan, Teori. Padang: Baduose Media
- Sukirno, Sudono, Ekonomi Pembangunan, 1985, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Bima Grafika
- Sukwika, T. (2018). Peran pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 6(2), 115-130.
- Syafrizal. 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat. Jakarta : Prisma vol. 3.
- Todaro M P, 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (H.Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Erlangga
- Todaro, Michael. P, 1989. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jakarta :PT Erlangga (Terjemahan).
- Umiyati, E. (2014). Analisa pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Pulau Sumatera. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 9(2), 42-48
- <https://news.detik.com/kolom/d-4659079/mengentaskan-ketimpangan-di-provinsi-gorontalo> (di akses pada tanggal 09 Agustus 2019 14:27 WIB).